

DINAMIKA ISU REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS) TERHADAP MASYARAKAT AMBON DALAM KONFLIK 1999

Oleh :

Christian Herman Johan de Fretes¹

ABSTRACT

RMS (Republik Maluku Selatan) issues and its influence In Ambon Conflict 1999 aims to explain how the RMS issue emerged and its influence on the conflict that occurred in Ambon. RMS issues never discussed and was never a dominant topic in political and social life in the community of Ambon since 1962. RMS issues became a major issue after the 1999 conflict. The conflict which had occurred as a result of the two young men who come from different ethnic groups went on to develop into a conflict between religions. In the midst of the conflict appeared a statement from several parties who claimed that the RMS is the party that responsible for Muslims killing and sectarian-based State wants to establish Christianity in the South Mollucas.

The result of this framing mobilization appeared in large numbers by one religious organization to Ambon will be analyzed using the theory of social movements and the emotion theory. The factors of a social movement framing and mobilization is the process by which allows because of the Political Opportunity after the collapse of the authority of Government otoritarian under Suharto. The issue of the RMS developed media by quoting statements from some religious figures and State officials as the responsible party in the conflict. As a result of this issue leads to a wider realm by engaging groups like laskar jihad were sympathetic and moved by emotion because both religious and solidarity as well as nationalism. In addition to the religious solidarity group was also motivated to fight the RMS movement. the prevalence of FKM (Front Kedaulatan Maluku) as the existence of the issue of RMS with its activities later hampered the peace process and will be influential in improving the conflict escalation of Ambon.

Keywords: *FKM (Front Kedaulatan Maluku), Social Movements, Emotion, Conflict, Laskar Jihad, RMS*

¹ Staff pengajar Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana

1. LATAR BELAKANG

Republik Maluku Selatan atau yang lebih dikenal dengan singkatan RMS hanyalah salah satu dari beberapa sejarah kelam yang mewarnai proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). RMS sebagai bentuk gerakan kemerdekaan seperti di tahun 1950 telah mengalami transformasi dan sekarang tidak lagi menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan kedaulatan NKRI. Kisah dan sejarah RMS ini berhasil dikubur oleh pemerintah Orde Baru dengan menjadikannya sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan bahkan terkesan “terlarang” sebagai sebuah kisah sejarah yang patut dibicarakan maupun dikaji secara akademis maupun non akademis di kalangan masyarakat Maluku..

Konflik yang berkepanjangan di Ambon, Maluku, sejak Januari 1999 hingga 2004 mungkin bisa dikategorikan sebagai konflik terlama semenjak keruntuhan Orde Baru 1998. Konflik ini tidak saja memakan korban jiwa sekitar 1.134 warga sipil namun juga telah merusak berbagai fasilitas umum, sarana perekonomian, dan infrastruktur. Sekitar 35 gedung pemerintah, 20 sekolah, 4 bank, 719 toko, 45 masjid, 47 gereja serta lebih dari 70.000 orang terpaksa mengungsi.² Konflik Ambon bukan saja menyangkut SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) karena ditengah-tengah konflik, muncul beberapa peristiwa mengejutkan terkait kehidupan sosial, budaya dan politik di Ambon. Dari munculnya kembali gerakan kemerdekaan RMS oleh FKM (Front Kedaulatan Maluku), kehadiran militer yang *massive* mencapai 16 batalyon pada bulan februari 2000,³ hingga sampai dengan keterlibatan organisasi keagamaan *Ahlus Sunnah wal Jamaah*.

Kemunculan RMS sebagai isu dalam konflik 1999 yang bisa disebut sebagai konflik “Politis” (*Political Conflict*) telah membangkitkan luka lama

² Ratnawati, Tri, mengutip M. Ichsan Loulembah. 2006. *Maluku Dalam catatan seorang peneliti- menatap ke depan agenda pasca konflik dan tugas pemerintah pusat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³ Ibid, Hal. 61

yang melibatkan tiga sejarah antara sejarah RMS, sejarah masyarakat Maluku, dan sejarah terbentuknya negara Indonesia. Semenjak dianggap sebagai penyebab konflik, isu RMS telah menimbulkan berbagai polemik dalam masyarakat. Isu ini mula-mula disebutkan oleh Yusuf Rahmi, ketua masyarakat Muslim Ambon di Jakarta, yang bersama-sama dengan ketua komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) Ahmad Sumargono saat menggelar jumpa pers di Jakarta, tanggal 28 Januari 1999 atau 9 hari setelah pecahnya konflik di Ambon. Dalam keterangannya waktu itu, Yusuf mengatakan ada dua faktor yang bertanggung jawab dalam kasus Ambon. Pertama, adalah gerakan separatis RMS dan kedua adalah kelompok elit politik yang frustrasi dengan perkembangan Islam di Ambon dan ditujukan ke tempat dimana bendera-bendera RMS pernah dikibarkan pada saat konflik terjadi. Disebutkan juga tentang adanya konspirasi untuk menghidupkan kembali RMS oleh elit Kristen Maluku yang berada di bawah naungan GPM (Gereja Protestan Maluku) melalui konflik, sehingga akan terciptanya sebuah wilayah timur Indonesia yang dikuasai Kristen bersama dengan Papua Barat.⁴ Isu ini kemudian disebarluaskan dan dipertegas kembali dengan pernyataan Menteri Transmigrasi yang juga Jenderal berbintang tiga, A.M. Hendropriyono saat kunjungan kerjanya ke daerah Maluku Utara.⁵ Teori yang disebarluaskan oleh Letjen (pur) A.M. Hendropriyono ini pun didukung oleh Feisal Tanjung seorang Jenderal Purnanirawan yang juga pernah menjadi Pangab pada jaman Orde Baru dan Menkopolkam di Era B.J. Habibie.⁶ Hendropriyono juga menyatakan bahwa beberapa aktor RMS yang berdomisili di Belanda bertanggung jawab terhadap konflik Ambon dibuktikan dengan adanya kurang lebih 250 orang aktivis RMS berdemo di beberapa daerah di Belanda, seperti di Den Haag, Amsterdam dan di Groningen. Dia juga menyatakan bahwa konsep dan ide RMS telah menyusup hingga di perguruan negeri Universitas Pattimura.⁷

⁴ Aditjondro, G. J, Cermin Retak Indonesia, Cermin, 2001, Yogyakarta. hal 14

⁵ Ahmad Suaedy, *Luka Maluku : Militer Terlibat*, Institut Study Arus Informasi, Jakarta, 2000, Hal . 59

⁶ Aditjondro, G. J, Orang-orang Jakarta dibalik tragedi Maluku, hal 14

⁷ Kompas, Hendropriyono : RMS dibalik kerusuhan Ambon, 10 Maret 1999

Munculnya Isu RMS dalam konflik sangatlah dini untuk bisa dikategorikan sebagai wujud (implementasi) gerakan separatis bersifat vertical yang diduga dimotori oleh Pemerintah pengasingan RMS di Belanda. Mengutip apa yang dikatakan salah seorang tokoh akademisi dan tokoh Maluku Prof. Aholiab Watloly mengatakan bahwa Isu RMS yang hadir didalam konflik 1999 bisa dibagi menjadi dua : yakni RMS yang bersifat ahistoris dan historis. Ahistoris karena Isu RMS yang dimotori oleh Alex Manuputty tidak terkait sama sekali dengan gerakan RMS tahun 1950 oleh Dr. Ch. Soumokil. Hal ini diperkuat dengan salah satu perwakilan dari Pemerintahan RMS di pengasingan menyatakan bahwa motivasi oknum Dr Alex Manuputty didalam FKM tidak ada kaitannya dengan pemerintahan RMS di pengasingan Belanda, (*Government in Exile*).⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Alex Manuputty dalam pergerakannya tidak mengusung ide-ide RMS yang menjadi dasar perjuangan RMS di tahun 1950 maupun pemerintahan RMS saat ini. Kedua adalah historis (sejarah) dimana masyarakat Maluku masih terikat secara ideologis dan terpengaruh dengan gerakan RMS tahun 1950. Dalam sejarahnya RMS memiliki beberapa kecenderungan yang mempengaruhi masyarakat Maluku. Oleh sebagian masyarakat beranggapan RMS adalah sebuah negara yang sah menurut Hukum Internasional bertolak dari perjanjian-perjanjian yang dulu pernah disepakati antara RI, Kerajaan Belanda, dan perwakilan dari daerah-daerah bekas pendudukan Belanda (Negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat) dimana semua perwakilan ini termasuk RI memiliki kedudukan setara sebagai daerah-daerah yang berdaulat, salah satunya adalah NIT – Negara Indonesia Timur yang mencakup Maluku.

Pecahnya konflik di Ambon, tidak terlepas dari keberhasilan gerakan reformasi menggantikan era otoritarian Orde Baru yang menginginkan rakyat untuk kembali berdaulat dan berkuasa. Munculnya organisasi FKM-RMS (Front Kedaulatan Maluku-Republik Maluku Selatan) yang memperjuangkan

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu petinggi *Government In Exile* RMS Belanda, 21 Februari 2016.

kemerdekaan Maluku sebagai negara berdaulat di dalam konflik mengantarkan konflik SARA ini ke dalam sebuah identitas konflik yang baru, yakni nasionalisme. RMS yang merupakan gerakan kemerdekaan di tahun 1950, meskipun telah ditumpas habis yang ditandai dengan kematian sang proklamator Dr. Chris Soumokil pada tahun 1966 ternyata belum sepenuhnya selesai. Saat ini RMS tetap eksis sebagai pemerintahan di pengasingan (*Government In Exile*) Belanda, namun pengaruh dan popularitas RMS tidaklah seterkenal sebelum konflik terjadi.

Selain dari bangkitnya gerakan kedaulatan FKM-RMS. Dampak dari konflik ini juga melahirkan komunitas-komunitas Islam baru dan yang paling berpengaruh adalah Forum Komunikasi *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Organisasi massa Islam ini adalah payung besar bagi puluhan majelis taklim dan *Halaqah Ahlus Sunnah*, sebuah forum yang dibentuk di Solo, 14 Februari 1999 dan berkantor pusat di Yogya. Melalui forum inilah kemudian akhirnya Ja'far Umar Thalib bersama semua pengikutnya mendeklarasikan lahirnya Laskar Jihad *Ahlus Sunnah wal Jamaah* pada 6 April 2000 dan bertekad berangkat ke Ambon sebagai laskar, sayap militer dari forum yang dipimpin langsung oleh Ja'far Umar Thalib sebagai panglimanya.⁹ Kehadiran isu RMS pada konflik 1999 sangat dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang secara popularitas memiliki *power* cukup besar dalam suatu komunitas. Selain tokoh-tokoh agama, politisi, negarawan juga sangat berperan mempengaruhi perkembangan sebuah isu di dalam masyarakat. Pernyataan tentang isu keterlibatan RMS sebagai penyebab konflik yang ingin mendirikan negara sektarian Kristen di wilayah selatan Maluku oleh komunitas Kristen, disimbolkan mereka melalui akronim RMS Republik Maluku Selatan yang diubah menjadi Republik Maluku Serani. Sehingga mengindikasikan kehidupan masyarakat Muslim sedang terancam akan dihabisi atau akan dikristenisasi.

⁹<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2002/05/13/LU/mbm.20020513.LU119593.id.html>. diakses tanggal 29 Mei 2012

Pada akhirnya pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut, dan yang kemudian disebarluaskan oleh media massa berdampak dalam bagaimana masyarakat luas menyikapi dan meresponi isu tersebut. Peran media sebagai instrument komunikasi memiliki peran besar dalam mem"*framing*" keberadaan RMS sebagai gerakan separatis yang bertanggung jawab terhadap penderitaan umat Muslim dan juga terhadap konflik yang berkepanjangan di Ambon. Berita-berita dan informasi yang termuat dalam media telah menggiring masyarakat kepada suatu pemahaman umum akan hal-hal yang ingin dikonstruksi. Media secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam mem"*framing*" dan mentransformasi identitas konflik di Ambon. Media pun menjadi penyebar keyakinan-keyakinan baru pada tingkat nasional tentang kebangkitan gerakan separatis di Ambon dan terancamnya keberadaan salah satu agama. Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana dinamika isu RMS dan dampaknya dalam Konflik Ambon 1999 ?

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Mengapa isu RMS ini sangat berpengaruh dalam konflik di Maluku khususnya Ambon ? apa sebenarnya yang melatar belakangi kekuatan dibalik isu RMS ini ? untuk menjawab kedua pertanyaan diatas maka penulis akan menguraikan dengan menggunakan teori emosi (*Emotion Theory*) dan teori Gerakan Sosial (*Social Movement Theory*).

Definisi Emosi menurut Roger Petersen :

"Emotion is a mechanism that riggers action to satisfy a pressing concern. An emotion operates to meet situational challenges in two ways: (1) an emotion raises the saliency of one desire/concern over others ; in other words, emotion helps select among competing

desires. (2) An emotion heightens both cognitive and physical capabilities necessary to respond to the situational challenge".¹⁰

Emosi tersebut terbagi atas empat variabel yakni : kebencian (*hatred*), ketakutan (*fear*), dendam, kemarahan (*resentment*), amukan (*rage*), sangat relevan jika apa yang dikatakan oleh Roger Petersen dikaitkan dengan kemunculan isu RMS sampai penaikan bendera RMS setiap tanggal 25 April. Keterlibatan pemerintah RMS Belanda di setiap penaikan bendera RMS pada saat konflik telah dibantah oleh Pemerintahan RMS Belanda. Sehingga menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya yang menaikan bendera RMS dan apa motivasi dibalik "kegiatan" setiap tanggal 25 April ?. Banyak rakyat Maluku yang masih dibayang-bayangi romantisme sejarah seringkali gegabah menunjukkan kekecewaan mereka terhadap negara dengan menaikan bendera RMS. Hal ini semata-mata dilakukan untuk bisa memperoleh perhatian dari pusat untuk lebih serius dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat Maluku. Namun tidak juga menutup kemungkinan bahwa penaikan bendera dan teror menjelang 25 April tidak ada kaitannya sama sekali dengan masyarakat Maluku namun lebih kepada kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu yang mendapatkan keuntungan melalui status quo Maluku sebagai konflik.

Ketakutan masyarakat atas pembenaran-pembenaran bentukan opini terhadap RMS ini telah menjadi ancaman bagi masyarakat Maluku. Dimana RMS ini secara keliru, telah terstigma oleh masyarakat (khususnya Muslim) sejak dulu bahwa RMS adalah Republik Maluku Serani. Ketakutan dan kecemasan masyarakat Maluku terhadap keberadaan isu RMS inilah yang dipakai untuk memobilisasi, membangkitkan amarah masyarakat yang telah terkonstruksi dan dipenuhi dengan propaganda-propaganda dan stigma-stigma sesat sejak lama.

¹⁰ Petersen, Roger D, *Understanding Ethnic Violence*, Cambridge university Press, 2002, Pp. 15

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas penulis juga menggunakan teori Gerakan Sosial (*social Movement theory*). Untuk melihat lebih jelas bagaimana teori ini relevan dalam mengkaji dinamika dan dampak Isu RMS dalam konflik. John Wilson mendefinisikan suatu gerakan social sebagai suatu :

*Organized Collectivities, large in potential scope use uninstitutionalized means to achieve their objectives, do not have limited objectives in the sense of restricting their aims to particular categories of people, purposive attempts to bring about change.*¹¹

Menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh John Wilson ini adalah bahwa gerakan sosial memiliki ciri sebagai suatu tindakan kolektif, dilakukan secara terorganisasi, mempunyai ruang lingkup yang secara potensial luas, menggunakan sarana atau cara yang non institusional di dalam upaya mencapai tujuannya, mempunyai tujuan yang tidak terbatas dalam pengertian tidak membatasi sasarannya pada kategori-kategori khusus para pendukungnya, dan menggunakan upaya-upaya yang jelas bagi terjadinya perubahan Sarana atau cara non institusional yang dimaksud Wilson adalah cara-cara demonstrasi dengan pengerahan massa, dan tidak semua gerakan menggunakan cara non-institusional. Dengan demikian ada gerakan-gerakan juga yang berasal dari institusional yang sifatnya sistematis dan struktural.

Pandangan Wilson tentang gerakan sosial yang juga bisa berasal dari institusional diperkuat dengan pendapat yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah namun juga bisa sebagai sebuah gerakan yang pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.¹² Dengan demikian gerakan sosial yang terjadi pada saat konflik

¹¹ John Wilson, 1973, *Introduction to Social Movements*. New York : Basic books, Ins. Publisher, pp. 4

¹² Juwono Sudarsono (ed), 1976, *Pembangunan politik dan Perubahan Politik*, Jakarta : Gramedia, Hal. 24-25

Ambon, dari munculnya isu RMS, mobilisasi laskar jihad, hadirnya FKM, dan keterlibatan media dalam membangun opini publik adalah satu dari tahapan-tahapan yang digunakan *agen* untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan mereka. Didalam pengkajiannya nanti untuk menjelaskan dinamika isu RMS terhadap masyarakat Ambon dalam konflik 1999, penulis akan menggunakan 3 variabel dari teori gerakan sosial yang pertama tentang Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*), kedua, Struktur Mobilisasi (*Mobilizing Structure*), ketiga, Proses *Framing* dan teori emosi (*Emotion Theory*).

3. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK

3.1. Militer dan Polri

Posisi TNI sebagai satu-satunya instrument militer negara sangat berperan dalam menciptakan keamanan dan memberikan keamanan dari setiap ancaman. Ancaman ini bukan saja ancaman yang berasal dari negara lain (eksternal) tapi juga ancaman yang berasal dari dalam negeri (internal). Salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri adalah separatism yang secara langsung mengancam keutuhan negara maupun tindakan-tindakan kekerasan yang juga berpotensi mengakibatkan disintegrasi bangsa. Pada konteks inilah militer sangat berperan penuh dan mengemban tanggungjawab yang besar.

3.2. FKM (Front Kedaulatan Maluku)

FKM dibentuk oleh Dr. Alex Manuputty pada bulan Juni 2000. Dengan salah satu tujuannya adalah menuntut kedaulatan atas kemerdekaan yang pernah diproklamasikan oleh Dr. Ch Soumokil pada tahun 1950. Kehadiran FKM membawa pengaruh besar terhadap isu RMS. Isu yang menyebar ke hampir seluruh daerah di Indonesia adalah RMS merupakan gerakan separatis yang dimotori oleh elit Kristen. Untuk menguatkan isi ini maka akronim RMS

pun dirubah menjadi Republik Maluku *Serani* (Kristen) yang diisukan hendak mendirikan negara sendiri terlepas dari NKRI. Muncul berbagai aksi solidaritas mengatasnamakan agama. Salah satunya adalah Laskar Jihad yang terbilang sangat reaktif dengan Isu RMS. Isu RMS bertransformasi menjadi sebuah fakta ketika FKM hadir mengusung ideology memperjuangkan kedaulatan atas proklamasi yang diklaim sah secara Hukum Internasional. Aktivitas FKM bukan saja membuat rakyat Muslim menderita tapi juga rakyat Kristen akibat konflik yang terjadi karena isu ini. FKM yang menuntut adanya pemisahan dari NKRI bagi sebagian orang adalah alat tawar terhadap pemerintah, sehingga pemerintah mau serius menyelesaikan konflik dan memulangkan Laskar Jihad. Namun di lain pihak laskar jihad merasa FKM adalah dalang konflik yang harus dibasmi dari Maluku.

3.3. Laskar Jihad, Laskar Kristen, dan Kelompok Preman

Laskar Jihad dibentuk pada Januari 2000 oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib yang sekaligus berperan sebagai panglima mereka. Kehadiran laskar jihad di Maluku adalah untuk membela NKRI dari ancaman separatism RMS. Ironisnya karena sebelum kedatangan Laskar Jihad Mei 2000, oleh Kapolda dan Pemerintah Maluku melalui Gubernur Saleh Latuconsina keberadaan gerakan ini telah dinyatakan sebagai hantu atau tidak eksis dan tidak terlibat dalam konflik, setidaknya sampai kehadiran FKM sebagai bentuk nyata gerakan yang menyuarakan kedaulatan penuh Maluku terlepas dari Negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Sebagai akibat dari pemberitaan media yang secara sepihak menceritakan tentang bagaimana terbantainya umat Islam Ambon dan semakin berkembangnya isu gerakan separatis RMS yang mengancam integritas kedaulatan NKRI. Dengan pimpinan Ja'far Umar Thalib organisasi Islam di bawah payung *Alsunah Jamaah* pasukan para militer ini diberangkatkan ke Ambon, dari beberapa kota di Jawa. Kehadiran mereka di Ambon tidak terlepas dari isu-isu yang selalu dihembuskan oleh beberapa birokrat negara dan mantan petinggi militer perihal keterlibatan RMS dalam konflik yang ingin mendirikan negara sendiri terpisah dari NKRI dan

terancamnya umat Muslim di Maluku yang selalu diberitakan secara intensive oleh beberapa media massa.

Termarjinalnya masyarakat Maluku pada masa Orde Baru, situasi “persaingan” birokrat yang sektarian (perekrutan berdasarkan agama dan latar belakang) dan semakin banyaknya pendatang dari luar daerah membuat pemuda Maluku pada umumnya menjadi terpinggirkan. Secara ekonomi kedudukan mereka sangat tertinggal karena persaingan dan diskriminasi. Pada tahap inilah pemuda-pemuda pada masa produktif berstatus pengangguran mulai mencari alternative untuk memperoleh penghasilan, ada yang berjuang secara akademis dengan belajar dan memperoleh beasiswa, namun hampir sebagian besar menjadi pemuda produktif yang tidak produktif. Mereka-mereka ini yang pada akhirnya bergabung dengan organisasi-organisasi radikal yang menjanjikan iming-iming masa depan yang lebih baik seperti FKM. Selain itu ada pula yang memilih untuk menjadi preman di ibu kota atau di daerah seperti Coker. Coker adalah kelompok preman yang berarti Cowok Keren, namun pada masa konflik oleh beberapa pihak diubah menjadi Cowok Kristen. Coker dipimpin oleh Berty Loupatty seorang pemuda yang pada akhirnya diketahui menjadi salah satu dalang provokator yang juga sekaligus menjadi anak asuh Kopassus. Peran Berty Loupatty sangat krusial dalam menelisik akar aktor yang bertanggung jawab atas beberapa kejadian yang terjadi di Ambon seperti penyerangan Soya dan pembakaran Gedung Gubernur yang sebelumnya diisukan RMS sebagai pihak yang bertanggung jawab.

4. PEMBAHASAN

ISU RMS DALAM KONTEKS TEORI GERAKAN SOSIAL DAN TEORI EMOSI

Demokratisasi paska Orde Baru memang telah membawa perubahan besar dalam kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat sampai pada

pandangan politik. Demokrasi sejati seperti apa yang idealnya sehingga demokrasi tidak seperti pedang bermata dua. Karena kebebasan yang ditawarkan demokrasi cenderung menimbulkan "limbah-limbah" demokrasi seperti marginalisasi minoritas oleh dominasi mayoritas, munculnya organisasi-organisasi radikal hingga sampai pada tuntutan pemisahan diri sebagai implikasi dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan pandangan politik. Kemunculan isu RMS dalam konflik dan kehadiran laskar jihad (FKAWJ) merupakan salah satu "limbah" demokrasi akibat masa transisi yang menjadi "pekerjaan rumah" bagi demokrasi itu sendiri dalam mengatasi bagaimana kebebasan itu berpotensi disalahgunakan, bisa oleh politisi, pers, militer, gerakan-gerakan radikal dan gerakan separatism. Sisi lain demokrasi yang memproduksi kesadaran akan pentingnya identitas inilah yang akan menghantarkan benih-benih konflik apalagi didukung dengan praktek-praktek diskriminasi dan ketimpangan ekonomi yang signifikan diantara keduanya.

Orde Baru selama ini telah mengekang kebebasan berbicara setiap individu maupun organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Paska runtuhnya Orde Baru yang dibarengi dengan demokratisasi telah membuka "kran-kran" berpolitik dan mengeluarkan pendapat dengan bebas. Kesempatan terbuka bagi siapa saja untuk mengeluarkan pendapat dan pandangan dalam segala aspek, tidak terkecuali bagi organisasi-organisasi politik maupun masyarakat dari yang separatist seperti OPM, RMS, dan GAM hingga organisasi masyarakat seperti Laskar Jihad. Bangkitnya organisasi keagamaan seperti FKAWJ dan munculnya gerakan separatist FKM mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah melalui aparat keamanan untuk menyelesaikan konflik Ambon. Dari kekecewaan inilah dan terbukanya *Public Sphere* yang selama jaman Orde Baru tertutup oleh rezim otoritarian. Membuat organisasi-organisasi yang dulunya terkekang dan terlarang kini bebas untuk berbicara dan bahkan untuk mengadakan mobilisasi massa dalam jumlah besar.

Salah satu proses yang penting dalam gerakan sosial adalah *framing*. Para akademisi gerakan sosial menyatakan bahwa untuk mencapai

kesuksesan, para aktivis harus mem *framing* dengan maksud agar bergema sejalan dengan ideologi, identitas dan kesepahaman kultural pendukung dan lainnya yang mungkin akan terlibat di dalamnya. Untuk sebuah pergerakan sosial tidak bisa berhasil jika tidak ada proses “pembingkaihan”. Proses pembingkaihan bisa melalui orasi-orasi dalam tabligh akbar, pertemuan-pertemuan yang mengatasnamakan keagamaan, kesamaan identitas bisa juga berdasarkan kesamaan tujuan. Pembingkaihan yang dibangun untuk mendapatkan simpati dan menarik perhatian massa menjadi salah satu langkah penting untuk keberhasilan sebuah gerakan sosial. Salah satu cara yang efektif dalam proses pembingkaihan ini adalah melalui media massa. Dalam penelitian ini penulis mengambil surat kabar Kompas dan Republika yang masing-masing dalam pemberitaannya memiliki pandangan berbeda. Pada Kompas, harian ini dengan berimbang lebih mengenai bagaimana konflik mempengaruhi kehidupan kedua komunitas yang berkonflik. Sedangkan Republika dengan gencar memberitakan Isu RMS yang digerakkan oleh masyarakat Kristen sebagai penyebab konflik yang mengakibatkan penderitaan masyarakat Muslim Maluku, sehingga panggilan Jihad merupakan bentuk perlawanan rasional mewakili nasionalis Muslim menghadapi gerakan-gerakan separatis dan juga sebagai bentuk solidaritas sesama Muslim.

Dalam konteks ini pembingkaihan juga dilakukan oleh beberapa birokrat negara seperti beberapa oknum mantan Jenderal TNI, dan Panglima Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib dalam berbagai kesempatan. Tabligh akbar yang dilaksanakan di Senayan adalah salah satu proses pembingkaihan aktor-aktor tersebut dalam mengangkat isu-isu krusial yang mengobarkan semangat perlawanan yang kuat. *Framing* yang dibangun adalah adanya pembersihan umat Muslim oleh masyarakat Kristen di Ambon dan pendirian negara Sektarian berbasis Kristen oleh RMS “Republik Maluku Serani”. Kedua isu yang diangkat ini mampu dikemas dengan sangat sempurna terbukti dengan keberangkatan ribuan orang sukarelawan Laskar Jihad ke Ambon beberapa saat setelah tabligh akbar tersebut diadakan. Keberhasilan “*framing*” ini tidak terlepas juga dari rasa kekecewaan yang muncul akibat lambannya dan

ketidaktegasan aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik. Pentingnya RMS ini untuk diangkat menjadi sebuah isu adalah karena dampak emosi yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat. Secara historis RMS meninggalkan luka yang dalam bagi sebagian masyarakat Maluku yang menjadi korban pada masa RMS di tahun 1950an. Dan bagi sebagian orang RMS memiliki ikatan emosi tersendiri oleh karena kekerabatan masyarakat Maluku yang di Belanda dengan yang berada di Ambon – Maluku. Kehadiran RMS di tengah-tengah masyarakat Ambon merupakan isu lama yang bukan hanya sekedar isu. Karena ideologi RMS secara emosional telah terkonstruksi dalam sebagian diri masyarakat Ambon. Ideologi yang terkandung dalam isu RMS dipakai bukan saja sebagai gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah di Maluku khususnya Ambon yang bertentangan dengan kebijakan maupun kearifan masyarakat lokal, tapi juga sebagai identitas kolektif yang terikat secara psikologis. Bagi masyarakat Ambon yang bersimpati dan memperjuangkan ideologi RMS, RMS bukanlah sebuah gerakan separatis yang ingin mendirikan negara sendiri terpisah dari NKRI. karena menurut pandangan mereka RMS telah ada dan merdeka sebelum NKRI muncul di tahun 1950.

Ikatan emosi inilah yang dipakai oleh agen dalam membingkai sebuah gerakan. Emosi yang menurut definisi Roger Petersen emosi adalah sebuah mekanisme yang memicu aksi untuk memenuhi suatu perhatian mendesak. Emosi bekerja didalam sebuah situasi melalui dua cara ; (1) saat emosi meningkatkan “hasrat” yang menonjol dari keinginan/perhatian di atas lainnya ; dengan kata lain emosi membantu menyeleksi keinginan-keinginan yang ada. (2) suatu emosi menguatkan kedua kemampuannya secara kognitif dan fisik yang dibutuhkan untuk meresponi dalam situasi sebuah tuntutan atau perlawanan.¹³ Emosi penting untuk dikaitkan dengan konflik Ambon, karena selain untuk melihat mengapa isu RMS bisa berpengaruh terhadap masyarakat Ambon dan dampaknya dari isu ini sehingga mampu menjelaskan bagaimana masyarakat Ambon bisa begitu reaktif terhadapnya. Teori emosi juga dapat

¹³ Petersen, Roger D, *Understanding Ethnic Violence*, Pp. 16

membantu dalam melihat beberapa masalah, seperti bagaimana emosi bisa menjadi salah satu kekuatan yang bisa membangkitkan gerakan perlawanan dari masyarakat terhadap identitas tertentu.

Menurut Peter, emosi bisa menjelaskan suatu *essensi* atas sebuah identitas. Ketika identitas berlipat ganda dan ditempa (*malleable*) identitas bisa mengkristal dan saat itu identitas (salah satu) tersebut tergegang dalam emosi yang kuat (*powerful emotion*). Ada empat pilar dari *Emotion* (emosi) : *fear* (ketakutan), *Hatred* (kebencian), *Raged* (amukan, kemarahan), *Resentment* (kejengkelan, kekusaran). Mengapa isu RMS ini begitu penting, bisa dilihat dari beberapa perspektif, isu ini muncul sebagai alat perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang berlawanan dengan kearifan lokal (kebudayaan lokal), sebagai instrument komersial, sebagai alat "teror" terhadap masyarakat, isu ini juga bisa dipakai untuk membangkitkan emosi masyarakat yang secara historis pernah menjadi korban RMS. Ketakutan akan bangkitnya RMS ini dirasakan khususnya oleh masyarakat Muslim yang dulu terkena dampaknya. Dengan adanya gerakan isu RMS dan pembersihan umat Islam maka secara tidak langsung telah membangkitkan luka lama akan gerakan RMS di masa lalu. Emosi kemarahan dan kebencian muncul kembali dikalangan masyarakat Muslim kemudian di implementasikan menjadi sebuah amukan massa. Itu sebabnya mengapa isu RMS ini berpotensi tinggi untuk dijadikan komoditas (instrument) dalam membangkitkan amarah masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang historis, isu RMS di dalam kehidupan sosial masyarakat Ambon telah membuat isu ini sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan oleh karena tersiratnya "ancaman" dalam isu ini maka tidak heran apabila pada masa Orde Baru isu ini selalu diredam oleh pemerintah namun tetap dipelihara sebagai alat terror terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya pemberitaan yang muncul di media massa tentang aktivitas RMS di Belanda maupun di Maluku. Mengutip hasil wawancara dengan Jacky Manuputty yang menyebutkan bahwa pemerintah di masa Orde Baru melalui Militer, TNI selalu menggunakan isu RMS ini untuk menunjukkan kekuatan militer mereka di tanah Maluku. Menurutnya di jaman Orde Baru setiap tahun

terjadi penangkapan terhadap para mantan anggota RMS oleh Militer dan anggota RMS tersebut di arak/angkut menggunakan truk dengan persenjataan lengkap pada setiap sebelum tanggal 25 April dan tahanan tersebut dilepaskan kembali beberapa hari kemudian.¹⁴ Melalui kejadian ini diharapkan timbul semacam ketakutan dari dalam diri masyarakat akan dampak dari RMS.

Metode yang digunakan pemerintah Soeharto boleh dikatakan berhasil karena selama jaman Orde Baru dan pasca runtuhnya kekuatan RMS pada tahun 1962. Masyarakat Maluku khususnya Ambon sangat paranoid dengan segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan RMS. Situasi ini bertolak belakang dengan adanya ritual pengibaran bendera di hampir setiap bulan April dari tahun ke tahun. Karena bagaimana masyarakat yang traumatis dan paranoid dengan setiap simbol, atribut maupun instrument yang berkaitan dengan RMS berani untuk menaikkan bendera atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan RMS. Karena hingga kini pengibar bendera yang terjadi sebelum tahun 1999 tidak pernah tertangkap dan tidak jelas siapa pelaku sebenarnya.

Di lain sisi ikatan kultural dan persaudaraan yang terjadi antara masyarakat Maluku yang berada di Ambon dan masyarakat Maluku yang berada di Belanda sangatlah erat. Ini terlihat dari kehidupan berbudaya Maluku yang masih kental di antara masyarakat Maluku di Belanda. Tidak sedikit orang Maluku di Belanda yang menaruh simpati, bahkan hingga kini masih tetap memperjuangkan ideologi RMS yang menginginkan kedaulatan penuh bagi Maluku lepas dari NKRI. Hubungan kekerabatan antara masyarakat Maluku Ambon dengan masyarakat Maluku Belanda yang sama-sama bersimpati, hingga kini masih terus memperjuangkan visi RMS. Faktor ini kemudian menjadi motivasi bagi penduduk di Ambon untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang eksistensi RMS di Ambon dengan tujuan mendapatkan bantuan finansial maupun penghargaan berupa uang. Mengenai RMS di Ambon atau Maluku pada umumnya tidak bisa terlepas dari pengaruh keberadaan masyarakat Maluku di Belanda. Dari hasil wawancara dengan

¹⁴ Manuputty, Jacky, Tokoh Agama sekaligus tokoh masyarakat Maluku, Wawancara pada tanggal 23 Maret 2012

salah satu wartawan senior yang juga salah satu aktivis gerakan perdamaian, Rudi Fofid, mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara aktivitas RMS oleh masyarakat Ambon dengan dana yang berasal dari Belanda. Dalam pengertian bahwa selama ini masyarakat yang terpinggirkan memperoleh perhatian dari saudara, kerabat, sedarah (sekampung) yang berada di Belanda yang lekat dengan paham RMS. Sehingga dengan situasi ini maka ada tanggung jawab secara moral ataupun dengan alasan ekonomi kegiatan RMS dilakukan oleh masyarakat di Ambon, motivasi-motivasi tersebut pun masih dipertanyakan seperti pengibaran bendera di halaman sekolah pada tahun 1993.¹⁵

DINAMIKA ISU RMS DALAM PROSES PERDAMAIAN

Setelah berkonflik kurang lebih selama 3 tahun, melalui mediasi yang diketuai oleh Menko Kesra Jusuf Kalla sebuah perundingan dilakukan untuk mempertemukan kedua pihak yang bertikai. Perundingan yang dinamakan dengan pertemuan Malino II karena mengambil tempat di Malino itu dihadiri 35 anggota delegasi Islam dan Kristen. Selain ke 70 delegasi tersebut hadir juga Gubernur Maluku Saleh Latuconsina, Wagub bidang Kesra Paula Renyaan, Pangdam XVI/Pattimura Brigjen Mustopo, Kapolda Maluku Soenarko Danu Ardianto, Ketua DPRD Maluku Etty Sahuburua, Walikota Ambon MJ Papilaja. Sedangkan dari pemerintah pusat selain Menkokesra hadir juga Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Kapolri Jenderal Da'I Bachtiar. Dalam pertemuan ini menurut ketua delegasi Kristen Tony Pariela dari kesemua 17 butir perbedaan berdasarkan pertemuan Januari di Makasar, 15 butir telah mencapai kesepakatan hanya dua butir yang menemui jalan buntu. Dua butir tersebut menyangkut isu RMS dan keberadaan laskar jihad. Pada pertemuan ini muncul perdebatan yang disebabkan oleh pihak Kristen yang menginginkan laskar jihad dipulangkan karena mereka menilai dengan kehadiran laskar jihad konflik akan terus terjadi. Sedangkan dari pihak Muslim meminta kelompok RMS ditindak lebih dulu.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Rudi Fofid, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2012

Gencarnya perkembangan isu ini dalam masyarakat sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah. Terlihat dari sikap pemerintah melalui Dephankam yang mengajukan dua Rancangan Undang-undang (RUU) yang nantinya menjadi RUU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya). Rancangan Undang-undang yang diajukan ini tentang Rakyat Terlatih (Ratih) dan RUU tentang keselamatan dan keamanan negara. RUU ini disampaikan Feisal Tanjung selaku Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua MPR/DPR Hari Sabarno 19 Juli 1999 di Jakarta.¹⁶ Menurutny ada tiga bentuk ancaman terhadap keselamatan dan keamanan Negara, yakni ancaman terhadap Negara Kesatuan RI oleh gerakan federalis dan separatis, seperti APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Ancaman terhadap ideologi negara pancasila seperti peristiwa Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun 1948, DI/TII, dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dengan terjadinya kerusuhan-kerusuhan SARA. Dimana dalam pelaksanaannya, atas ijin presiden, Panglima TNI dapat menggunakan kekuatan TNI dan dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pangdam dengan dibantu oleh Kapolri dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati). Tindakan-tindakan itu seperti : pelarangan sementara seseorang memasuki atau meninggalkan suatu wilayah tertentu, pembatasan atau penutupan wilayah, dan pembatasan orang diluar rumah. langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang menjadi sumber pertikaian adalah dengan mengadakan perundingan yang melibatkan tokoh-tokoh Muslim dan Kristen dalam perundingan yang diadakan di Malino, Makasar 12 Februari 2002. Setelah perundingan yang dilakukan selama kurang lebih tiga hari di Malino. Muncul 11 point perjanjian damai Maluku yang diyakini dapat menyelesaikan pertikaian dan menjernihkan sumber-sumber masalah yang muncul selama ini seperti isu RMS dan keberadaan laskar Jihad. Dengan suksesnya kesepakatan melalui perjanjian Malino yang dicapai oleh

¹⁶ *Kompas*, Dephankam Ajukan dua RUU mengenai keamanan Negara, 20 Juli 1999

kedua pihak yang bertikai, muncul cikal bakal perdamaian di Ambon. Karena pada pelaksanaannya hasil perjanjian tersebut mampu diaktualisasikan dan direalisasikan oleh semua pihak dalam menangani isu-isu yang menjadi permasalahan khususnya mengenai isu RMS dan keberadaan laskar jihad di Ambon.

5. KESIMPULAN

Munculnya isu RMS dalam konflik Ambon yang dinyatakan oleh beberapa pihak seperti tokoh-tokoh Militer, politisi maupun agama. yang menyatakan keterlibatan RMS dalam konflik yang dimotori oleh komunitas Kristen yang hendak mendirikan negara Sektarian Kristen di wilayah selatan Maluku dan terancamnya masyarakat Muslim Maluku karena akan adanya pembersihan agama oleh komunitas Kristen. Telah membangkitkan rasa solidaritas dan nasionalisme berdasarkan persamaan identitas keagamaan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan *framing* yang dibangun oleh *agent* tersebut dan dipublikasikan media massa telah mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar untuk terlibat dalam konflik. Sehingga eskalasi konflik makin meningkat pasca kehadiran laskar jihad dan munculnya FKM sebagai oposisinya. Disamping lambannya dan ketidaktegasan militer maupun aparat keamanan yang cenderung parsial dalam penanganan konflik dengan alasan yang sifatnya lebih personal dan subjektif.

Dapat disimpulkan bahwa isu RMS pada konflik Ambon tahun 1999 sangat berdampak negative dalam proses perdamaian dan menjadi penyebab meningkatnya eskalasi konflik karena konflik yang tadinya horizontal bersinergi dengan isu separatism akhirnya menjadi konflik vertikal. Melalui *Framing* yang dibangun oleh beberapa *agent* yang menyatakan isu RMS sebagai penyebab konflik dan akan didirikannya negara sektarian Kristen melalui pembersihan salah satu agama telah berhasil menarik solidaritas dan memobilisasi massa. Dengan terlibatnya Laskar Jihad dan munculnya FKM

dengan ideologi RMS semakin membuat proses perdamaian di Ambon sulit dilakukan karena kedatangan laskar jihad ke Ambon meskipun untuk mempertahankan integritas NKRI dari isu RMS namun mereka menggunakan jalan kekerasan untuk melawan seluruh masyarakat Kristen Maluku dengan asumsi bahwa semua orang Kristen Maluku adalah separatis.

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, G.J, 2001, *Cermin Retak Indonesia*, Cermin, Yogyakarta

Baldrige, J. Victory, 1998, *Sociology : A critical Approach to Power Conflict and Change*. New York, London, Sidney, Toronto : John Wiley and Son, Inc

Barron, Patrick, dkk, 2012, *Perang Komunal : Memahami Kekerasan Pasca-Konflik dan Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya*, CSPA Books, Yogyakarta

Bertrand, Jacques, 2004, *"Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia"*, Cambridge University Press, New York

Chauvel, R. 1990, *"Nationalists, Soldiers, and Separatists"*, KILTV Press, Leiden

Davis, Gerald F, dkk, 2005, *Social Movements and Organization Theory*, Cambridge University Press, New York

Fainstei, Norman I. and Fainstein, Susan S, 1974, *Urban Political Movements*. Englewood cliff, New Jersey:Prentice –Hall, Inc

Gurr, T.R. *"Minorities at Risk"*, 1993, United States Institute of Peace Press, Washington DC

- Hadi, Syamsul, dkk, 2007, Disintegrasi Pasca Orde Baru : *Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*, Centre for International Relations Studies (CIReS) dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Hanitzsch, Thomas, dkk, 2002, Media-Militer-Politik. "*Crisis Communication : Perspektif Indonesia dan Internasional*", Galang, Yogyakarta
- Harper, Charles L, 1986, *Exploring Social Change*. New Jersey : Prentice Hall
- John D, Mc Carthy, 1996, "Constraints and Opportunities in adopting, adapting and inventing" dalam *Comparative Perspective on social movements political Opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*, ed. Doug Mc Adam, John D. McCarthy & Mayer N. Zald (Cambridge: Cambridge University Press
- McAdam, Doug, 1996, Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions dalam "*Comparative Perspective on social movements political Opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*", ed. Doug Mc Adam, John D. McCarthy & Mayer N. Zald, Cambridge: Cambridge University Press
- Mirsel, Robert, 2004, *Teori Pergerakan Sosial*, Resist Book, Yogyakarta
- Petersen, Roger D, 2002, *Understanding Ethnic Violence*, Cambridge University Press
- Pieris, John, 2004, Tragedi Maluku : *Sebuah Krisis Peradaban*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Situmorang, Abdul W, 2007, "Gerakan Sosial" : *Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Soenyono, 2008, Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan : *Political Opportunities, Mobilizing Structures, dan Cultural Framing*, Insan Cendekia
- Suaedy, Ahmad, 2000, *Luka Maluku : Militer Terlibat*, Institut Study Arus Informasi, Jakarta
- Sudarsono, Juwono, 1976, *Pembangunan politik dan Perubahan Politik*, Jakarta : Gramedia
- Sudibyo, Agus, 2001, *Politik media dan Pertarungan Wacana*, LKiS, Yogyakarta
- Susan, Novri, 2010, Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer, Kencana, Jakarta
- Tarrow, Sidney, 1998, *Social Movements in Contentious Politics : A review*, California: Sage Publications
- Tri, Ratnawati, 2006, Maluku Dalam catatan seorang peneliti- menatap ke depan agenda pasca konflik dan tugas pemerintah pusat,, Loulembah, M. Ichsan, Pustaka Pelajar
- Trijono, Lambang, 2001, *Keluar dari Kemelut Maluku*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Waileruny, Samuel, 2010, Membongkar konspirasi di balik Konflik Maluku, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Wilson, John, 1973, *Introduction to Social Movements*. New York : Basic books, Ins. Publisher
- Yahya, Muhaimin dan colin Mac Andrews, 1998, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, UGM Press, Yogyakarta

Zald, Mayer N, 1996, "Culture, Ideology, and Strategic" dalam *Comparative Perspective on Social movements Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*, ed. Doug McAdam, John D. Mc Carthy & Mayer N. Zald , Cambridge University Press

JURNAL

Brown, Graham,dkk, 2005, Overcoming Violent Conflict volume IV : *Peace and development analysis in Maluku and North Maluku*,CPRU-UNDP, LIPI and BAPPENAS, Jakarta

Sharp, Steve, 2011, "Framing Religious Conflict Primordialism Writ Large", Asia Pacific Media Educator, Issue No.21

Yani, Buni, 2002, Reporting the Maluku sectarian conflict : *"The Politic of Editorship in Kompas and Republika Dailies"*, Southeast Asian Studies Center For International Studies

